

Jelang Pilkada Jenepono? Ketua Partai Golkar, PPP dan PAN Duduk Bersama, Ini yang Dibahas

Muh. Andhi Syam - JENEPONTO.JURNALIS.ID

May 12, 2022 - 12:18



Jelang pemilihan presiden tahun 2024, tiga partai besar, yakni Golkar, PAN dan PPP resmi berkoalisi.

JENEPONTO, SULSEL- Jelang pemilihan presiden tahun 2024, tiga partai besar, yakni Golkar, PAN dan PPP resmi berkoalisi.

Koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu telah di deklarasikan pada Kamis (12/05/2022). Hal itu dilakukan oleh Ketiga partai politik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tertuang pasal 222.

Dengan dideklarasikannya koalisi tersebut, apakah akan berdampak pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang juga akan digelar pada tahun 2024.

Seperti di Kabupaten Jenepono, tiga pimpinan partai politik di Butta Turatea

melakukan pertemuan awal dalam berkomunikasi terkait Koalisi Indonesia Bersatu pada Senin, 23 Mei 2024.

Pertemuan, Ketua DPD II Partai Golkar Jenepono H. Iksan Iskandar, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jenepono HM Imam Taufiq Bohari, dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Jenepono Asdin Basoddin Azis Beta untuk menindak lanjuti instruksi partai.

Ditanya terkait pembahasan ketiga pimpinan partai politik itu, Ketua DPC PPP Jenepono, Imam Taufiq Bohari mengatakan membahas terkait koalisi partai. "Koalisi partai ditingkat pusat yang ditindak lanjuti sampai di tingkat daerah," kata Imam Taufiq.

Akankah koalisi Indonesia bersatu akan berdampak dalam berkoalisi untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Jenepono?.

"Kita lihat nanti seperti apa konstalasi politik, termasuk hasil Pileg 2024," kata Imam Taufiq.

Sementara, Ketua DPD PAN Jenepono, Asdin Basoddin Azis Beta mengaku, pertemuan tiga pimpinan partai politik itu membahas terkait koalisi Indonesia bersatu yang telah dideklarasikan oleh pimpinan partai pusat.

"Jadi intinya menindaklanjuti perintah partai, kita di daerah ikut saja dengan perintah partai," jelas Asdin. Terkait dalam menghadapi Pilkada Jenepono, Asdin mengaku belum membahas hal tersebut.

"Tentunya kita harapkan komunikasi terus dilakukan, jika instruksi pimpinan partai di pusat itu wajib, kenapa tidak," jelas Asdin.

Penulis: Syamsir

Editor: Cq